

HUBUNGAN ISLAM DAN POLITIK DI INDONESIA PERSPEKTIF PEMIKIRAN HASAN AL-BANNA

Ridwan

Universitas Muhammadiyah Malang
gayokuridwan93@gmail.com

Abstract, Hasan al Banna, is one of the leaders of Islam. His ideas and movements together with the Muslim Brotherhood have aroused the fighting spirit of Islamic society in order not to be left behind. Back to life inspired by al-quran and Sunnah movement. Although this Islamic reformation has died, his mind still exists in the life of Islamic society. Therefore, In political thought, Hasan al-Banna associates faith with political activity. Surely a Muslim is not perfect to his or her own unless he becomes a politician, who has a foresight and gives full attention to issues of content and race. According to him, the Islamic one should lead to the attention of the nation. Islam is a comprehensive system, covering all aspects of life. Nevertheless, Islam and Indonesian Politics from contemporary times continue to grow and increase, certainly not apart from the development of religion and politics in Indonesia in general.

Keywords: Hasan Al-banna, Islam and Politics, Indonesia

Abstrak, Hasan al Banna, merupakan salah satu tokoh Islam. Ide-idenya dan gerakan bersama-sama dengan *Ikhwanul Muslimin* telah terangsang semangat juang masyarakat Islam agar tidak tertinggal. Kembali ke kehidupan terinspirasi oleh al-quran dan Sunnah gerakan. Meskipun iniAngka pembaruan Islam telah meninggal, pikirannya masih ada dalam kehidupan masyarakat Islam. Oleh karena itu, Dalam pemikiran politik, Hasan al-Banna menghubungkan iman dengan aktivitas politik. Tentunya seorang Muslim tidak sempurna keislamannya kecuali jika dia menjadi politisi, yang memiliki pandangan kedepan dan memberikan perhatian penuh terhadap isu-isu dan ras. Menurutnya, yang Islami harus mengarah pada perhatian terhadap masalah bangsa. Islam adalah sistem yang komprehensif, mencakup semua aspek kehidupan. Namun demikian Islam dan Politik Indonesia dari zaman kezaman terus berkembang dan meningkat, tentu tidak terlepas dari perkembangan Agama dan politik di Indonesia pada umumnya.

Kata kunci: Hasan Al-banna, Islam dan Politik, Indonesia.

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang universal, agama membawa misi *rahmatan lil* „*alamin* serta membawa konsep kepada ummat manusia mengenai persoalan yang terkait dengan suatu sistem seperti konsep politik, perekonomian, penegakan hukum, dan sebagainya. Kemudian Dalam bidang politik misalnya, Islam mendudukannya sebagai sarana penjagaan urusan umat. Islam dan politik integratif terwujud pada beberapa pemikir dan politisi muslim yang hadir dari masa ke masa dengan pemikiran dan pola perjuangannya yang berbeda-beda, salah satu diantaranya adalah Hasan al-Banna.

Politik Islam merupakan penghadapan Islam dengan kekuasaan dan negara yang melahirkan sikap dan perilaku politik (*political behavior*) serta budaya politik (*political culture*) yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. Sikap dan perilaku serta budaya politik yang memakai kata sifat Islam, menurut Taufik Abdullah, bermula dari suatu kepribadian moral dan doktrinal terhadap keutuhan komunitas spiritual Islam.¹ Senada dengan Din Syamsuddin, Azyumardi, mengemukakan pandangan antropolog Dale Eickelman dan ilmuwan politik James Piscatori yang menyimpulkan bahwa gambaran politik Islam (Muslim) di seluruh dunia dewasa ini adalah pertarungan terhadap “penafsiran makna-makna Islam dan penguasaan lembaga-lembaga politik formal dan informal yang mendukung pemaknaan Islam tersebut”. Pertarungan seperti ini melibatkan “objektifikasi” pengetahuan tentang Islam yang pada gilirannya memunculkan pluralisasi kekuasaan keagamaan.²

Islam meletakkan politik sebagai satu cara penjagaan urusan umat (*ri'ayah syu-ūn al-ummah*). Islam dan politik tidak boleh dipisahkan, kerana Islam tanpa politik akan melahirkan terbelenggunya kaum muslimin yang tidak mempunyai kebebasan dan kemerdekaan melaksanakan syariat Islam. Begitu pula politik tanpa Islam, hanya akan melahirkan masyarakat yang mengagungkan kekuasaan, jabatan, bahan, dan duniawi saja, kosong dari aspek moral dan spiritual. Oleh kerana itu, politik dalam Islam sangat penting bagi mengingatkan kemerdekaan dan kebebasan melaksanakan syariat Islam boleh diwadahi oleh politik.³

Pemikiran Politik dalam Islam berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Beberapa nama pemikir muslim yang menjadi rujukan dalam pemikiran politik diantaranya Al-Mawardi (w.1058 M), Ibn Taimiyyah (w.1328 M) Ibn Khaldun (w.1406 M), Ibn Abd al-Wahhab (w.1793 M), Jamaluddin al-Afghani (w.1897 M), dan Muhammad Abduh (w.1905 M). Selain beberapa nama itu, tokoh pergerakan Islam yang tidak kalah penting adalah Hasan al-Banna. Beliau berasal dari tanah Mesir dan mempunyai pemikiran yang menarik dalam bidang politik.

Ada dua hal yang bersifat kontradiktif dalam konteks hubungan politik antara Islam dan negara di negara-negara Muslim atau negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia. Kedua hal tersebut yakni; Pertama, posisi Islam yang menonjol karena kedudukannya sebagai agama yang dianut sebagian besar penduduk negara setempat. Kedua, sekalipun dominan Islam hanya berperan marjinal dalam wilayah kehidupan politik negara bersangkutan. Sebagai agama yang dominan dalam masyarakat Indonesia, Islam telah menjadi unsur yang paling berpengaruh dalam budaya Indonesia dan merupakan salah satu unsur terpenting dalam politik Indonesia. Namun demikian Islam hanya berperan marjinal dalam wilayah kehidupan politik nasional. Hal ini antara lain

¹ M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 31

² Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Postmodernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 12

³ Zaki Ulya, “Perbandingan Pemilihan Kepala Negara Di Indonesia (Suatu Kajian Hukum Positif Indonesia Dan Fiqh Siyasah)”, *Jurnal Al Qadha*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2015, hlm. 27

disebabkan karena dikotomi “politik Islam” dan “non politik Islam” di kalangan umat Islam Indonesia yang telah berlangsung lama.⁴

Hasan al-Banna merupakan tokoh pembaharuan pemikiran Islam yang juga pendiri sekaligus *Mursyid* „*Aam* pertama Ikhwanul Muslimin. Bagi Hasan al-Banna pembaharuan itu boleh dilaksanakan asal tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadits. Pemikiran pembaharuan Hasan Al-Banna berdasarkan atas keyakinan bahwa Islam adalah agama universal yang sesuai dengan perkembangan peradaban manusia, yang pada intinya dapat dikemukakan dalam lima aspek, yaitu: agama/moral, politik, sosial, ekonomi, dan pendidikan.⁵ (Kurnia, 2012). Di Indonesia, Ikhwanul Muslimin semakin berkembang setelah Muhammad Natsir mendirikan partai yang ajarannya identik dengan Ikhwanul Muslimin, yaitu Partai Masyumi yang kemudian keberadaannya dilarang oleh Soekarno. Kemudian ketika Partai Masjumi dilarang pada tahun 1960 oleh Rezim Otoriter, tokoh-tokoh Masjumi termasuk M. Natsir kemudian mengalihkan perhatiannya ke aktivitas dakwah dan pendidikan, dan lalu mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) pada 1967.⁶

Ikhwanul Muslimin, selanjutnya disingkat IM adalah sebuah organisasi pergerakan Islam kontemporer yang besar. Organisasi ini tersebar di kurang lebih 70 negara, tidak hanya di Timur Tengah, tetapi juga di wilayah lainnya. Organisasi ini didirikan oleh Hasan Al-Banna (1324-1368 H/ 1906-1949 M) di Mesir, pada bulan April 1928. Organisasi ini menyeru untuk kembali kepada Islam, sebagaimana terdapat dalam Alqur’an dan Sunnah, yang mengajak untuk menerapkan syari’at Islam dalam realitas kehidupan, mengembalikan kejayaan Islam dan berdiri menentang arus sekularisasi di kawasan Arab dan dunia Islam.⁷

Menurut Anggaran Dasar (AD) IM disebutkan, bahwa tujuan gerakan organisasi ini adalah melakukan dakwah Islam yang benar, menyatukan umat Islam, menjaga kekayaan negara untuk mensejahterakan rakyat, meningkatkan keadilan sosial serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Tujuan lain IM adalah membebaskan seluruh negeri Arab dan Islam dari kekuasaan asing, mendorong Liga Arab dan Pan Islamisme, membentuk negara yang melaksanakan semua hukum dan ajaran Islam seutuhnya dan mendukung kerjasama internasional untuk melindungi hak dan kebebasan serta berpartisipasi dalam menciptakan perdamaian dan mengembangkan peradaban kemanusiaan yang baru.⁸ Dalam sebuah buku yang bertajuk *Transnational Islam in South and Southeast*, Norhaidi Hasan membagi manifestasi Islam transnasional dalam empat kategori; *pertama* yang berorientasi sufisme, mereka adalah kelompok yang mencoba mengikuti Rasulullah secara utuh, misalnya saja Jamaah Tabligh. *Kedua*, adalah gerakan

⁴ M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 51

⁵ Kurnia Ilahi, *Perkembangan Modern Dalam Islam*, (Pekanbaru: Pustaka Riau, 2012), hlm. 9

⁶ Anthony Bubalo, dkk, *PKS dan Kembarannya Bergiat Jadi demokrat Di Indonesia, Mesir, dan Turki*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 44

⁷ Fathi Yakan, “Revolusi” *Hasan Al-Banna: Gerakan Ikhwanul Muslimin dari Sayyid Qutb sampai Rasyid Al-Ghannusy*, terj. Fauzun Jamal dan Alimin, (Bandung: Harakah, 2002), hlm. 71

⁸ Ali Abdul Halim Mahmud, *Ikhwanul Muslimin Konsep Gerakan Terpadu*, Jilid I dan II, terj. Masykur Hakim dan Ubaidillah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 21

kesalehan; *Ketiga*, adalah gerakan politik; dan *keempat*, adalah gerakan charity. Norhaidi Hasan menambahkan bahwasanya empat kategori tersebut merupakan tipe gerakan Islam transnasional yang non-radikal.⁹ Setelah Rasulullah SAW wafat, paradigma politik Islam terus berkembang. Dien Syamsuddin, mengkatagorisasikannya pada tiga paradigma: (1) Agama dan negara tidak bisa dipisahkan (integrated); (2) Agama dan negara berhubungan secara simbiotik; dan (3) Islam tidak mempunyai kaitan apaupun dengan sistem pemerintahan (sekularistik).¹⁰

Nuansa politik dalam Islam telah berkembang sejak zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu, menurut keyakinan mayoritas Muslim menerapkan model masyarakat Islam ideal era Nabi SAW bukanlah utopia, sebab model itu pernah terbukti dalam sejarah. Jika pada periode Mekah kaum muslimin masih menempati posisi marginal dan senantiasa tertindas, maka pada periode Madinah mereka telah mengalami perubahan yang sangat dramatis: umat Islam menguasai pemerintahan dan bahkan merupakan a *self-governing community*. Di Madinah peran Nabi Muhammad SAW selain sebagai agamawan beliau juga sebagai negarawan.¹¹ Sejak saat itu oleh pakar politik modern, Islam dipandang sebagai suatu sistem pemerintahan politik dan sekaligus agama.¹²

Pembahasan

a. Biografi Hasan Al-Banna

Hasan Al-Banna dilahirkan pada tahun 1906 M, di sebuah desa bernama Al-Mahmudiyyah, yang masuk wilayah Al-Buhairah. Ayahnya seorang yang cukup terkenal dan memiliki sejumlah peninggalan ilmiah seperti *Al-Fathurrabbani Fi Tartib Musnad Al-Imam Ahmad Asy-Syaibani*, ia adalah Ahmad bin Abdurrahman Al-Banna yang lebih dikenal dengan *As-Sa'ati*. Al-Banna memulai pendidikannya di *Madrasah Ar-Rasyad Ad-Diniyyah* dengan menghafal Alqur'an dan sebagian hadis-hadis Nabi serta dasar-dasar ilmu bahasa Arab, di bawah bimbingan *Asy-Syaikh Zahran* seorang pengikut tarekat *Shufi Al-Hashafiyah*.

Al-Banna sangat terkesan dengan sifat gurunya yang mendidik, sehingga ketika *Asy-Syaikh Zahran* menyerahkan kepemimpinan madrasah itu kepada orang lain, Hasan Al-Banna pun ikut meninggalkan madrasah. Selanjutnya ia masuk ke *Madrasah I'dadiyyah* di Mahmudiyyah, setelah berjanji kepada ayahnya untuk menyelesaikan hafalan Alqur'annya di rumah. Tahun ketiga di madrasah inilah awal perkenalannya dengan gerakan-gerakan dakwah melalui sebuah organisasi yang *Jum'iyatul Akhlaq Al-Adabiyyah*, yang dibentuk oleh guru matematika di madrasah tersebut, bahkan Al-Banna

⁹ Syamsul Arifin, *Nalar Multi Kulturalisme Kebangsaan Dalam Merespon Gerakan-Gerakan Islam Transnasional Di Indonesia*, (PSIF-UMM, 13 April 2013), hlm. 21

¹⁰ Din Syamsudin, "*Usaha Pencarian konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Islam*", *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF) dan ICMI, No.2/IV/1993), hlm.5

¹¹ Dewan Editor, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam-2*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hove, 2002), hlm. 11

¹² Rahmat Effendi, "*Kekuasaan Negara dalam Perspektif Dakwah Islam*", *Mimbar, Jurnal Sosial dan Pembangunan*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas, LPPM Unisba, 2003), hlm. 87

sendiri terpilih sebagai ketuanya. Aktivasnya terus berlanjut hingga ia bergabung dengan organisasi *Man'ul Muharramat*. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di *Madrasah Al-Mu'allimin Al-Ula* di kota Damanhur. Di sinilah ia berkenalan dengan tarekat *Shufi Al-Hashafiyah*. Ia terkagum-kagum dengan majelis dzikir dan lantunan nasyid yang didendangkan secara bersamaan oleh pengikut tarekat tersebut.

Lebih tercengang lagi ketika ia dapati bahwa di antara pengikut tarekat tersebut ada guru lamanya yang ia kagumi, *Asy-Syaikh Zahran*. Akhirnya Al-Banna bergabung dengan tarekat tersebut. Sehingga ia pun aktif dan rutin mengamalkan dzikir-dzikir *Ar-Ruzuqiyyah* pagi dan petang hari. Tidak ketinggalan, perayaan maulud Nabi pun rutin ia ikuti. Di antara aktivitas selama bergabung dengan tarekat ini ialah pergi bersama teman-teman se-tarikat ke kuburan, untuk mengingatkan mereka tentang kematian dan *hisab* (perhitungan amal). Mereka duduk di depan kuburan yang masih terbuka, bahkan salah seorang dari mereka terkadang masuk ke liang kubur tersebut dan berbaring di dalamnya agar lebih menghayati hakekat kematian nanti. Al-Banna terus bergabung dengan tarekat tersebut sampai pada akhirnya ia berbai'at kepada *syaikh* tarekat saat itu yaitu *Asy-Syaikh Basyuni Abd Al- Jabir Rizq*. Sepeninggal Basyuni, Al-Banna berbai'at kepada *asy-Syaikh Abdul Wahhab Al-Hashafi*, pengganti pendiri tarekat tersebut. Ia diberi ijazah wirid-wirid tarekat tersebut. Al-Banna pernah mengungkapkan: „Dan saya berteman dengan saudara-saudara dari tarekat *Al-Hashafiyah* di Damanhur. Saya rutin mengikuti acara *al-hadhrat* di Masjid Taubah setiap malam. Sayyid Abdul Wahhab-pun datang, dialah yang memberikan ijazah di kelompok tarekat *Hashafiyah Syadziliyyah*, dan saya mendapat ajaran tarekat ini darinya. Ia juga memberi saya wirid dan amalan tarekat itu“.

Karena faktor tertentu, akhirnya kelompok tarekat ini mendirikan sebuah organisasi yang bernama *Jum'iyah Al-Hashafiyah Al-Khairiyah* dan diketuai oleh teman lamanya, Ahmad As-Sukkari. Sementara itu, Hasan Al-Banna menjadi sekretarisnya dan ia mengatakan: „Di saat-saat ini, nampak pada kami untuk mendirikan organisasi perbaikan yaitu *Al-Jum'iyah Al-Hashafiyah Al-Khairiyah*, dan aku terpilih sebagai sekretarisnya... Lalu dalam perjuangan ini, aku menggantikannya dengan organisasi *Ikhwanul Muslimin*“. Setelah itu Al-Banna menghabiskan waktunya di *madrasah Al-Mu'allimin* dari tahun 1920-1923 M. Di sela-sela masa itu, ia juga banyak membaca majalah *Al-Manar* yang diterbitkan oleh Muhammad Rasyid Ridha, salah seorang tokoh gerakan *Ishlahiyah* yang banyak dipengaruhi pemikiran Mu'ta-zilah. Di sisi lain, ia pun suka mendatangi *Asy-Syaikh Muhibbuddin Al-Khathib* di perpustakaan salafinya. Al-Banna, ketika ingin melanjutkan pendidikannya ke *Darul Ulum*, sempat bimbang antara melanjutkan atau menekuni dakwah dan amal. Ini dikarenakan interaksinya dengan buku *Ihya' Ulumuddin*. Namun bermodalkan nasehat dari salah seorang gurunya, ia mantap untuk melanjutkan pendidikan. Ia akhirnya memutuskan melanjutkan pendidikannya di *Darul Ulum*. Di sini, ia sangat giat membentuk *jamaah-jamaah* dakwah, sehingga di tengah-tengah aktivitasnya tercetus dalam benaknya, ide untuk menjalin hubungan dengan orang-orang yang duduk di warung kopi dan berada di desa-desa terpencil untuk mendakwahi mereka. Pada akhirnya Al-Banna lulus dari *Darul Ulum* pada tahun 1927M.

Usai pendidikannya di *Darul Ulum*, ia diangkat menjadi guru di daerah Al-Isma'iliyyah. Ia pun mengajar di sekolah dasar selama 19 tahun. Sebelumnya, ia datang ke daerah itu pada tanggal 19 September 1927 dan tinggal di sana selama 40 hari untuk mempelajari seluk-beluk lingkungan tersebut. Ternyata, ia dapati banyak terjadi perselisihan di antara masyarakat, sementara ia berkehendak agar dapat berkomunikasi, bergaul dengan semua pihak, dan mempersatukannya.¹³

b. Latar Belakang Pemikiran Hasan Al-Banna

Berikut beberapa kejadian serta peristiwa yang mempengaruhi pemikiran politik Hasan Al-Banna

- a) Keikutsertaan Hasan Al-Banna dalam Tarekat Al-Hasafiyah, membuat beliau menanamkan pengaruh dalam dirinya, betapa eratnya hubungan antara pemimpin dengan pengikutnya. Berkat hubungannya dengan sufi dia senantiasa menghargai tasawuf, selama hal tersebut tidak mengandung bid'ah yang menurut muslim skripturalis sering mengotori praktik keyakinan sufi. Hasan Al-Banna tidak mengutuk tasawuf, tetapi justru menyerukan perubahan sufi yang salah jalan dan membersihkan sufi dari noda. Jadi bisa disimpulkan bahwa, beliau meneguk salafisme yang dikemas dengan gaya yang tidak kuno, sehingga bisa disebut beliau sebagai seorang neo-sufi.
- b) Kepergian Hasan Al-Banna pada 1923 ke Kairo untuk belajar. Pada masa itu beliau banyak terlibat dengan perkembangan pemikiran atau situasi politik yang sedang melanda Mesir. Ketika itu Mesir sedang mengalami ketidakmenentuan politik. Ditandai dengan selalu terjadinya pertikaian antara kelompok-kelompok politik yang ada serta westernisasi yang melekat kuat.
- c) Saat Hasan Al-Banna menginjak remaja, dunia Islam sedang mengalami penurunan kepemimpinan Khilafah. Ditandai dengan runtuhnya Khilafah Turki Usmani dan diplokamirkannya Republik Turki yang modern sekuler oleh Mustafa Kemal Atarturk pada tanggal 02 Maret 1924. Dari hal inilah masyarakat muslim mulai mengganti hukum Allah dan menggantinya dengan Hukum *Wadh'iy* (buatan manusia). Dan Hasan Al-Banna menolak dengan hal ini dan mengatakan :

“ pada dekade ini yang saya lalui di Kairo kala itu, semakin merajalela arus kerusakan, kejahatan berpendapat, dan berpikir dianggap sebagai kebenaran rasio. Kerusakan moral dan akhlak di anggap sebagai kebebasan individu. Gelombang kemurtadan dan gaya hidup bebas melanda sangat deras tanpa ada penghalangannya, didukung oleh berbagai kasus dan situasi yang mengarah kesana.¹⁴

c. Pemikiran Politik Al-Banna

Hassan al-Banna disebut-sebut sebagai *neo-salafie* dengan pemikiran tiga pandangan dasar yaitu 1) Islam adalah sebuah sistem komprehensif yang mampu

¹³ Hasan Al-Banna, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*, (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm. 21-26

¹⁴ Muhammad Iqbal, dkk, *Pemikiran Politik Islam: dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 18

berkembang sendiri, 2) Islam memancar dari dua sumber fundamental yaitu al-Quran dan al-Hadis dan 3) Islam berlaku untuk segala waktu dan tempat.¹⁵ Al-Banna membagi fase pembinaan dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu 1) fase pengenalan seluruh lapisan masyarakat, 2) fase pembentukan kader (*marhalah al-takwin*) dari elemen pilihan yang sudah terkumpul, dibentuk regu-regu pejuang dakwa, 3) fase realisasi (*marhalah al-tanfidz*) dengan melakukan gerakan (*harakah*) dakwa bersama-sama mewujudkan hukum Allah SWT di muka bumi.¹⁶

Pemikiran Hassan al-Banna yang berkaitan dengan politik terbagi dalam 3 (tiga) kelompok pikiran, 1) reformasi sosial dengan asas akidah, 2) tidak adanya pemisahan agamadan negara 3) syariat Islam sebagai undang-undang tertinggi dalam pemerintahan Islam.¹⁷ Ikhwanul Muslimin (IM) memproklamkan diri sebagai gerakan politik pada tahun 1939, yaitu pada Muktamar ke-5 IM, bertepatan dengan peringatan 10 tahun kelahirannya. Ada dua alasan pokok yang berkaitan politik yang merupakan tujuan umumnya, yaitu; pertama membebaskan negara Islam dari penguasa asing. Kedua, mendirikan negara Islam yang bebas melaksanakan hukum Islam, menerapkan sistem sosial masyarakat dan menyampaikan prinsip dan dakwahnya kepada seluruh manusia.¹⁸

1. Agama dan Politik

Politik adalah ilmu pemerintahan atau ilmu siyasah, yaitu ilmu tata negara. Pengertian dan konsep politik atau siyasah dalam Islam sangat berbeda dengan pengertian dan konsep yang digunakan oleh orang-orang yang bukan Islam. Politik dalam Islam menjuruskan kegiatan umat kepada usaha untuk mendukung dan melaksanakan syari'at Allah melalui sistem kenegaraan dan pemerintahan. Ia merupakan sistem peradaban yang lengkap yang mencakup agama dan negara secara bersamaan.¹⁹ Sejak IM didirikan oleh Al-Banna kondisi Mesir dan dunia Arab berada dalam lingkungan pemikiran Barat. Para tokoh sekuler hanya membatasi aktivitas agama sebatas dinding masjid dan menjadi urusan pribadi. Padahal pada dasarnya Islam adalah sistem yang sempurna.²⁰

Kesuksesan dakwah Rasulullah pun merupakan suatu implementasi dari strategi politik yang beliau rancang, bisa kita lihat mulai dari hijrah ke Madinah hingga puncaknya adalah *Fathu Makkah* (penguasaan Mekah). Ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah dan para sahabat bukannya mencoba lari dari intimidasi rezim kafir Quraisy, namun justru sebaliknya Rasulullah dan para sahabat melakukan konsolidasi politik yakni mulai dari membangun kekuatan politik internal hingga

¹⁵ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Postmodernisme*, hlm. 51

¹⁶ Fathi Yakan, *Gerakan Ikhwanul Muslimin: Dari Sayyidm Quthb Sampai Rasyid al-Ghanussyi*, (Jakarta: Harakah, 2002), hlm. 88

¹⁷ Azhar, Muhammad, *Filsafat Politik, Perbandingan Antara Islam dan Barat*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 11

¹⁸ Adib Dimitri, "As-Simat al-Asasiyah li al-Harakah al-Islamiyah fi Misr" dalam *Al-Ushuliyat al-Islamiyyah fi* „*Asrina al-Rahin*, (Kairo: Qadayah Fikriyyah, 1993), hlm. 19

¹⁹ Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 44

²⁰ Musthafa Muhammad Thahan, *Pemikiran Muderat Hasan Al-Banna*, (Bandung: Harakatuna Publishing, 2007), hlm. 4

mengadakan koalisi politik dengan kaum Yahudi dan Nasrani melalui nota perjanjian Piagam Madinah. Beliau berpendapat bahwa, „Politik adalah hal yang memikirkan tentang persoalan-persoalan internal maupun eksternal umat.²¹

Adapun yang dimaksud dengan politik sisi internal adalah mengatur roda pemerintahan, menjalankan tugas-tugasnya, merinci hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, melakukan pengawasan terhadap penguasa untuk kemudian dipatuhi jika mereka melakukan kebaikan dan dikritik serta diluruskan jika kemudian mereka menyimpang. Sedangkan yang dimaksud dengan sisi eksternal politik adalah ‘menjaga kebebasan dan kemerdekaan bangsa, menanamkan rasa kepercayaan diri, kewibawaan, dan meniti jalan menuju sasaran - sasaran yang mulia, yang dengan cara itu bangsa akan memelihara harga diri dan kedudukan tinggi dikalangan bangsa-bangsa lain, serta membebaskan dari penindasan dan intervensi pihak lain dalam urusan-urusannya dengan menetapkan pola interaksi bilateral maupun multilateral yang menjamin hak-haknya serta mengarahkan semua negara menuju perdamaian internasional yang peraturan ini bisa mereka sebut Hukum Internasional.²²

2. Konsep Khalifah Islamiyah Hassan al-Banna

Hassan al-Banna menilai bahwa khalifah merupakan rukun atas berlangsungnya pemerintahan Islam. Ia menandakan bahwa langkah-langkah menuju khalifah Islamiyah wajib dilaksanakan dengan menguatkan barisan keluarga. Sehingga kemampuan umat Islam benar-benar tangguh dalam membentuk khalifah Islamiyah. Imam tidak mutlak dari Ikhwanul Muslimin, siapapun bila memang mampu dapat menjadi Imam, dan ikhwanul muslimin sebagai garda depan melindungi. Dalam kaitan ini. Al-Banna mengajak untuk menghindari jauh-jauh dari partai-partai politik dan lembaga-lembaga politik lainnya yang mengakibatkan perpecahan. Ia sangat menolak multi partai dalam sebuah pemerintahan.²³

3. Konsep Jihad Hassan al-Banna

Dalam salah satu bukunya Risalah al-Jihad yang dikutip Muhammad Ali Gharizhah, Hassan al-Banna menulis “Islam adalah ibadah dan kepemimpinan, agama, dan negara, rohani dan jasmani, shalat dan jihad, ketaatan dan pemerintahan, mushaf dan pedang tidak dapat dipisahkan antara satu dari yang lain. Dari katakaini Hassan al-Banna menjadikan jihad adalah rukun yang asasi bagi gerakan Ikhwanul Muslimin yang pada akhirnya gerakan adalah satu bentuk kerja dan perjuangan bukan sekedar filsafat ataupun pemikiran. Jihad adalah kewajiban agama yang sama sekali tidak lebih kecil artinya dibanding kewajiban-kewajiban lain, bahkan ia adalah metoda

²¹ Utsman Abdul Mu’iz Ruslan, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin: Studi Analisis Evaluatif terhadap Proses Pendidikan Politik Ikhwan untuk para Anggota khususnya dan seluruh Masyarakat Mesir Umumnya, dari tahun 1928 hingga 1945*, (Solo: Era Intermedia, 2000), hlm. 8

²² Hasan Al-Banna, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*, hlm. 66

²³ Hasan Al-Banna, *Panggilan al-Qur’an*, (Terj), Pustaka, 1998, hlm. 154

dasar dalam dakwah demi mencapai tujuan yang meliputi seluruh sisi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial.²⁴

4. Persamaan Hak Penuh menurut Hasan Al Bana

Karya karyanya berjudul *Al-Islam Yahmiil Aqalliyyaati wa Yashuunu Huqunqal Ajaanib* (Islam menjagakelompok minoritas dan memelihara hak-hak orang lain). Dalam bukun itu dinyatakan Islam menyucikan persatuan manusia secara universal. Kemudian mensucikan persatuan agama secara universal pula ketika terjadi fanatisme. Islam mengharuskan para pemeluknya untuk mengimani seluruh agama samawi. Kemudian Hassan al-Banna menegaskan, inilah yang Islam yang dibangun di atas sikap moderat dan kesadaran tinggi, tidak mungkin diikuti oleh pemecah belahpersatuan yang terpadu ini. Namun sebaliknya, kesucian agama yang mampu mempersatukan manusia ini terkadang dijadikan alat legitimasi kepentingan tertentu. Kemudian Dalam tulisannya yang bertajuk *Musykilaatunaa fi Dhau'in-Nizhaam I-Islami* (problematika kita dalam persfektif sistem Islam), Hassan al-Banna menyatakan dengan jelas “minoritas nonmuslim yang menjadi warga negara ini diajari kesempurnaan ilmu tentang bagaimana mencapai ketenanganhidup, keamanan, keadilan, dan persamaan hak secara penuh dalam menjalankan seluruh ajaran agamanya. Dengan nada menyatukan, Hassan al-Banna menambahkan, sejarah panjang yang membenteng hubungan baik dan mulia antara warga negara muslim dan nonmuslim, cukuplah bagi kita sebagai bekal. Kita perlu mencatat prestasi para warga negara yang mulai itu karena mereka menjunjung tinggi makna-makna ini pada setiap kesempatan, menjadikan Islam sebagai makna nasionalismenya, meskipun hukum-hukum dan ajaran ajarannya tidak berasal dari akidah mereka (akidah non Islam).²⁵

5. Islam di Indonesia

Untuk mempelajari suatu agama, termasuk agama Islam harus bermula dari mempelajari aspek geografis dan geografi persebaran agama-agama dunia. Setelah itu dapat dipahami pula proses kelahiran Islam sebagai salah satu dari agama dunia, terutama yang dilahirkan di Timur Tah, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Ketiganya dikenal sebagai agama langit atau wahyu. Kedua hal itu, geografi persebaran dan persebaran agama itu sendiri. Selanjutnya untuk dapat memahami proses perkembangan Islam sehingga menjadi salah satu agama yang dianut oleh penduduk dunia yang cukup luas, harus dikenali lebih dahulu tokoh penerimaan ajaran yang sekaligus menyebarkan ajaran itu, yaitu Muhammad saw., sang pembawa risalah. Keberhasilan proses Islamisasi di Indonesia ini memaksa Islam sebagai pendatang, untuk mendapatkan simbol-simbol kultural yang selaras dengan kemampuan penangkapan dan pemahaman masyarakat yang akan dimasukinya dalam pengakuan

²⁴ Muhammad Al-Gharishah, *Lima Dasar Gerakan al- Ikhwan*, (terj), (Jakarta: Gema Insani Press, 1992), hlm. 67

²⁵ Hasan Al-Banna, *Panggilan al-Qur'an*, hlm. 157

dunia Islam. Langkah ini merupakan salah satu watak Islam yang pluralistik yang dimiliki semenjak awal kelahirannya.²⁶

Kedatangan Islam di berbagai daerah Indonesia tidaklah bersamaan. Demikian pula kerajaan-kerajaan dan daerah-daerah yang didatanginya mempunyai situasi politik dan sosial budaya yang berlainan. Proses masuknya Islam ke Indonesia memunculkan beberapa pendapat. Para Tokoh yang mengemukakan pendapat itu diantaranya ada yang langsung mengetahui tentang masuk dan tersebarnya budaya serta ajaran agama Islam di Indonesia, ada pula yang melalui berbagai bentuk penelitian seperti yang dilakukan oleh orang-orang barat (eropa) yang datang ke Indonesia karena tugas atau dipekerjakan oleh pemerintahnya di Indonesia. Tokoh-tokoh itu diantaranya, Marcopolo, Muhammad Ghor, Ibnu Bathuthah, Dego Lopez de Sequeira, Sir Richard Wainsted.²⁷

6. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia

TAHUN	PELAKSANAAN
1945	Terjadi penyimpangan dari ketentuan UUD '45 antara lain: a. Berubah fungsi komite nasional Indonesia pusat dari pembantu presiden menjadi badan yang disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR. b. Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer berdasarkan usul BP – KNIP.
1949-1950	Didasarkan pada konstitusi RIS. Pemerintahan yang diterapkan saat itu adalah sistem parlementer kabinet semu (<i>Quasy Parliamentary</i>). Sistem Pemerintahan yang dianut pada masa konstitusi RIS bukan kabinet parlementer murni karena dalam sistem parlementer murni, parlemen mempunyai kedudukan yang sangat menentukan terhadap kekuasaan pemerintah
1950-1959	Landasannya adalah UUD '50 pengganti konstitusi RIS '49. Sistem Pemerintahan yang dianut adalah parlementer kabinet dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu. Ciri-ciri: a. presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat. b. Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan. c. Presiden berhak membubarkan DPR. d. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden Presiden mempunyai kekuasaan mutlak dan dijadikannya alat untuk melenyapkan kekuasaan-kekuasaan yang menghalanginya sehingga nasib parpol ditentukan oleh presiden (10 parpol yang diakui). Tidak ada kebebasan mengeluarkan pendapat
1966-1998	Orde baru pimpinan Soeharto lahir dengan tekad untuk melakukan koreksi terpinpin pada era orde lama. Namun lama kelamaan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Soeharto mundur pada 21 Mei '98.
1998-Sekarang (Reform)	Pelaksanaan demokrasi pancasila pada era reformasi telah banyak memberikan ruang gerak pada parpol maupun DPR untuk mengawasi pemerintah secara kritis dan dibenarkan untuk unjuk rasa. (budiana, 2014)

²⁶ Ahmad Sugiri, "Proses Islamsisasi dan Percaturan Politik Umat Islam di Indonesia", dalam Al-Qalam, Majalah Ilmiah Bidang Keagamaan dan Kemasyarakatan, No. 59/XI/1996, (Serang: IAIN SGD, 1996), hlm. 43.

²⁷ Uka Tjandrasasmita (Ed.), *Sejarah Nasional Indonesia III*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), hlm. 73

7. Sikap menghargai aspirasi rakyat

Mengenai menghargai aspirasi rakyat, Al-Banna menjelaskan, Di antara hak umat Islam adalah mengawasi roda pemerintahan sedetail mungkin dan aktif bermusyawarah berkenaan sesuatu yang dipandang baik. Sementara itu, kewajiban pemerintah adalah bermusyawarah dengan rakyat, menghargai aspirasinya, dan mengambil masukan-masukan yang baik. Allah SWT telah memerintahkan kepada pemerintah agar melakukan hal itu, Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. (Ali Imran: 159). Bahkan, Allah memuji kaum muslimin yang mau bermusyawarah sebagai muslimin yang baik, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka (Asy-Syura: 38).

Masalah ini juga ditegaskan oleh Sunah Rasulullah SAW dan Khaulafur Rasyidin. Ketika muncul suatu masalah, mereka mengumpulkan para ahli dari kaum muslimin, bermusyawarah, dan mengambil pendapat yang benar dari mereka. Lebih dari itu, para khalifah mengajak dan menganjurkan kaum muslimin untuk (berpegang) pada pendapat yang benar. Abu Bakar Ash-Shiddiq berkata, Jika kalian melihat aku di atas kebenaran, maka dukunglah (untuk melaksanakannya), dan jika kalian melihatku dalam kebatilan, maka betulkan dan luruskanlah. Umar bin Khatthab berkata, “Siapa saja yang melihatku menyimpang, maka luruskanlah”.²⁸

8. Karakteristik Masyarakat Muslim Perspektif Hasan Al-Banna.

Hasan Al-Banna merujuk kepada pendapat Sayid Qutub tentang karakteristik Masyarakat muslim, ia berpendapat bahwa karakteristik masyarakat muslim adalah : Ia berdiri di atas landasan aqidah, yang terefleksikan pada peribadahan kepada Allah swt. Semata dalam keyakinan, simbol-simbol keislaman, dan ibadah individunya, juga dalam peraturan dan undang-undangnya. Ideologi adalah fondasi, yang oleh Islam diletakkan sebagai dasar dari pilar-pilar lainnya seperti kelas sosial, kepentingan ekonomi, atau lainnya. Karakter ini merupakan hal yang membedakan antara masyarakat muslim dengan masyarakat lainnya. Hasan Al-Banna menjelaskan tentang asas-asas yang di atasnya tertegak masyarakat muslim, yang dianggapnya sebagai dasar-dasar reformasi sosial yang lengkap, yaitu:

1. Memperhatikan aspek moral dan melindungi masyarakat dari tindak kriminal dan kemungkaran
2. Memperhatikan keluarga dan mendudukan status perempuan secara proporsional.
3. Menekankan kesetiakawanan, solidaritas sosial dengan berbagai jenisnya, juga persatuan.
4. Tanggung jawab negara kepada Islam dan dakwah Islam.

²⁸ Hasan Al-Banna, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*, hlm. 99

5. Pemberian tanggung jawab reformasi sosial kepada individu.

Hasan Al-Banna menggambarkan kekhasan masyarakat Muslim, secara otomatis, proses pembentukannya juga bersifat khas. Yaitu dengan cara mewujudkan adanya kelompok manusia yang menerima aqidah Islam dan mengakui bahwa ia tidak beribadah kepada selain Allah, baik dalam keyakinan, ibadah, Syi'ar, aturan, maupun undang-undang. Kelompok ini melaksanakan dengan nyata dalam perjalanan hidupnya secara keseluruhan, berdasarkan asas ini. Ketika itu, terjadilah kelahiran atau pembentukan masyarakat baru. Unsur-unsur dari hal itu adalah, pertama, sekelompok manusia. Kedua, terdidik di atas aqidah. Ketiga, kehidupannya diatur dengan landasan aqidah, seutuhnya.²⁹

Dari pendapat Hasan al banna di atas bawasanya umat muslim selain memiliki sifat sosial, namun harus memiliki solidaritas dalam kehidupan sehari-hari, meskipun dalam kehidupan sehari-hari banyak kita berbenturan dengan pemahaman atau keyakinan seperti kita di masyarakat, akan tetapi pada haekatnya umat muslim harus memahami dari berbagai karakteristik yang ada di masyarakat

Penutup

Dengan demikian jika dilihat dari paparan di atas terkait dengan pemikiran Hasan Al-banna antara Politik dan Islam (Agama) penulis menarik kesimpulan bahwasanyajelas ruang lingkup dari Islam itu sendiri tidak memungkinkan untuk tidak menyentuh lingkup politik dan negara. Hal ini juga terkait dengan aturan dalam Islam itu sendiri yang mengatur urusan-urusan yang memerlukan kekuasaan sebagai pelaksanaannya. Jadi agama dan politik mempunyai hubungan yang tidak terpisahkan. Namun jika di telaah dari pemikiran Hasan Al-banna ini tentu salah satu sebagai bahan acuan untuk masyarakat Indonesia, meskipun kita adalah negara demokrasi, dan juga bukan Negara Agama, namun alangkah ilmiyahnya hubungan antara negara dan agama tidak bisa dipisahkan, serta saling membutuhkan di antara kedua ini.

Daftar pustaka

Abdul Halim Mahmud, Ali, *Ikhwanul Muslimin Konsep Gerakan Terpadu*, Jilid I dan II, terj. Masykur Hakim dan Ubaidillah, Jakarta: Gema Insani Press, 1997

Abdul Mu'iz Ruslan, Utsman, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin: Studi Analisis Evaluatif terhadap Proses Pendidikan Politik Ikhwan untuk para Anggota khususnya dan seluruh Masyarakat Mesir Umumnya, dari tahun 1928 hingga 1945*, Solo: Era Intermedia, 2000

²⁹ Utsman Abdul Mu'iz Ruslan, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin: Studi Analisis Evaluatif terhadap Proses Pendidikan Politik Ikhwan untuk para Anggota khususnya dan seluruh Masyarakat Mesir Umumnya, dari tahun 1928 hingga 1945*, (Solo :Era Intermedia, 2000), hlm. 63

- Abdul Mu'iz Ruslan, Utsman, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin: Studi Analisis Evaluatif terhadap Proses Pendidikan Politik Ikhwan untuk para Anggota khususnya dan seluruh Masyarakat Mesir Umumnya, dari tahun 1928 hingga 1945*, Solo: Era Intermedia, 2000
- Al-Banna, Hasan, *Panggilan al-Qur'an*, (Terj), Pustaka, 1998
- Al-Banna, Hasan, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*, Solo: Era Intermedia, 2005
- Al-Gharishah, Muhammad, *Lima Dasar Gerakan al- Ikhwan*, (terj), Jakarta: Gema Insani Press, 1992
- Arifin, Syamsul, *Nalar Multi Kulturalisme Kebangsaan Dalam Merespon Gerakan-Gerakan Islam Transnasional Di Indonesia*, PSIF-UMM, 13 April 2013
- Azhar, Muhammad, *Filsafat Politik, Perbandingan Antara Islam dan Barat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Azra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Postmodernisme*, Jakarta: Paramadina, 1996
- Bubalo, Anthony, dkk, *PKS dan Kembarannya Bergiat Jadi demokrat Di Indonesia, Mesir, dan Turki*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2012
- Dewan Editor, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam-2*, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hove, 2002
- Dimitri, Adib, *"As-Simat al-Asasiyah li al-Harakah al-Islamiyah fi Misr" dalam Al-Ushuliyyat al-Islamiyyah fi Asrina al-Rahin*, Kairo: Qadayah Fikriyyah, 1993
- Effendi, Rahmat, *"Kekuasaan Negara dalam Perspektif Dakwah Islam"*, Mimbar, Jurnal Sosial dan Pembangunan, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas, LPPM Unisba, 2003
- Ilahi, Kurnia, *Perkembangan Modern Dalam Islam*, Pekanbaru: Pustaka Riau, 2012
- Iqbal, Muhammad, dkk, *Pemikiran Politik Islam: dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010
- Muhammad Thahan, Musthafa, *Pemikiran Muderat Hasan Al-Banna*, Bandung: Harakatuna Publishing, 2007
- Rais, Dhiauddin, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Sugiri, Ahmad, *"Proses Islamsisasi dan Percaturan Politik Umat Islam di Indonesia"*, dalam Al-Qalam, Majalah Ilmiah Bidang Keagamaan dan Kemasyarakatan, No. 59/XI/1996, Serang: IAIN SGD, 1996
- Syamsuddin, M. Din, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001
- Syamsuddin, M. Din, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001
- Syamsudin, M. Din, *"Usaha Pencarian konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Islam"*, Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF) dan ICMI, No.2/IV/1993
- Tjandrasmita, Uka (Ed.), *Sejarah Nasional Indonesia III*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984

- Ulya, Zaki, “Perbandingan Pemilihan Kepala Negara Di Indonesia (Suatu Kajian Hukum Positif Indonesia Dan Fiqh Siyasah)”, *Jurnal Al Qadha*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2015
- Yakan, Fathi, “Revolusi” *Hasan Al-Banna: Gerakan Ikhwanul Muslimin dari Sayyid Quthb sampai Rasyid Al-Ghannusy*, terj. Fauzun Jamal dan Alimin, Bandung: Harakah, 2002
- Yakan, Fathi, *Gerakan Ikhwanul Muslimin: Dari Sayyid Quthb Sampai Rasyid al-Ghanussy*, Jakarta: Harakah, 2002